



**RENSTRA 2025-2029  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025**

Formulir E.68  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah  
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupateb/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah gun mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK		
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, September 2025  
 Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
 dan Keluarga Berencana  
 Kota Bandar Lampung,



Henny Maryuniwati, S.STP.  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19830605 200112 2002

Mengetahui;  
 Plt. Kepala Bapperida  
 Kota Bandar Lampung,


DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi oleh :		2025	Tanda Tangan
1	<b>Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.</b>		
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung		
2	<b>RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.</b>		
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung		

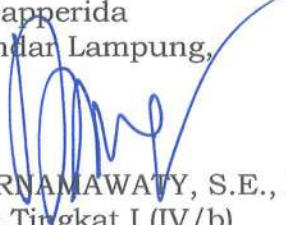
Formulir E.69

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan startegi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada startegi dan arah kebijaksanaan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	Sudah sesuai dengan RPJMD

Diverifikasi oleh :		2025	Tanda Tangan
1	<b>Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.</b>		
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung		
2	<b>RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.</b>		
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung		

Bandar Lampung, September 2025  
Plt. Kepala Bapperida  
Kota Bandar Lampung,

  
DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19700218 199303 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penyusunan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

Penyusunan Renstra adalah suatu keharusan bagi setiap PERANGKAT DAERAH dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota Bandar Lampung no.12 th 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH pada lima tahun kedepan. Dalam penyelesaian Renstra ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandar Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Bandar Lampung, September 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana



**HENNY MARYUNIWATI, S.STP.**

NIP. 19830605 200112 2002

**LAMPIRAN 16**  
**PERATURAN WALIKOTA**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR: 31 tahun 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH ( RENSTRA )**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar

2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 .RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2029 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2011-2015, 2016-2021, dan 2021-2025). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka untuk perodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,

- (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan
- (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencanas strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan

perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu **“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Kerakyatan”**.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana strategis (Renstra) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025– 2029;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor );
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor

- Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
  19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
  20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor );
  21. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor );
  22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 47).
  23. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 31 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra ).

### **1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandar Lampung dan sumber pembiayaan APBN.
2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
3. Memberi gambaran tentang kondisi umum pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung saat dalam pembangunan provinsi dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi program untuk menunjang sebagai perwaju dan visi dan misi daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung

4. Sebagai panduan penyusunan program dan kegiatan yang terpadu, terarah dan terukur bagi jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung.
5. Sebagai arahan dalam memahami dan menilai arah dan kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rentang waktu lima tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Formulir E.80., Tabel T-C.23, dan Tabel T-C.24

### **BAB III TUJUAN ,SASARAN,STRATEGI, DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - 1. Jabatan Fungsional Perencanaan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
  - Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
- d. Bidang Keluarga Berencana;
  - Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  - Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
- f. Bidang Pengendalian Penduduk ;
  - Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

## B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

Tabel 1.1 Inventaris Nilai Barang Di Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp.)
1	Tanah	417.000.000
2	Alat-alat angkutan	3.442.495.000
3	Alat pertanian dan peternakan	1.980.000
4	Alat alat kantor dan rumah tangga	1.185.831.700
5	Alat studio dan komunikasi	101.011.000
6	Alat bengkel	9.900.000
7	Alat alat kedokteran dan kesehatan	2.283.310.100
8	Gedung dan bangunan	1.396.567.000
9	Barang bercorak kesenian dan kebudayaan	14.500.000
10	Extra Countable	3.000.000
	Jumlah	8.855.594.800

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

### a) Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 1.470 M<sup>2</sup> yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Kosong : 370M<sup>2</sup>
- Tanah Bangunan Kantor : 1100M<sup>2</sup>

### b) Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 1100 M<sup>2</sup> yang terletak diatas tanah seluas 1.470 M<sup>2</sup> di Jalan Bung Tomo No. 12. Gedung air Kecamatan Tanjung Karang Barat.

### c) Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

d) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Desember 2024 sebanyak 6 (Lima ) unit Kendaraan Roda empat (Mobil Unit Pelayanan, Mobil Akseptor, Mupen, Alkon dan Kendaraan Dinas jabatan ada 2 unit ) dan 122 unit Kendaraan Roda 2.

e) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berjumlah 113 orang yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Di Dinas Pengendalian penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	14
2	Fungsional Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana)	88
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf	11
Jumlah		113

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung memiliki kader Intitusi Masyarakat Perkotaan. IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai

dari tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord. PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).

Selain Koord. PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD, ada lagi kader IMP yang juga berperan aktif mensukseskan program KB di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB KS.

Kelompok KB-KS ini merupakan kelompok peserta KB/KS dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat RT yang melakukan kegiatan di bidang KB seperti Posyandu, UPPKS, kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sebagainya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung juga memiliki unit pelayanan dan konseling yang diberi nama Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Ragom Kencana. Keberadaan PPKS diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi keluarga-keluarga kita sekaligus mengantisipasinya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Melalui PPKS keluarga dapat bangkit dari keterpurukan dan ketidakberdayaan yang selama ini menyebabkan kehidupannya tidak sejahtera. Oleh karena itu bentuk pelayanan dalam PPKS telah distandarkan

secara nasional yang setidaknya mencakup delapan hal, yaitu:

- 1) Pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana. Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh data dan informasi pengelolaan program kependudukan dan KB melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis teknologi Informasi. Dengan demikian, keluarga akan mendapatkan informasi akurat yang dibutuhkan dalam rangka memperluas wawasannya tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan keluarga sejahtera maupun pengendalian penduduk.
- 2) Konseling keluarga balita dan anak. Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang bagaimana merawat dan mengasuh balita agar dapat tumbuh dan berkembang secara ideal, bagaimana membentuk karakter anak sejak dini dan bagaimana seharusnya melakukan pengasuhan anak di era globalisasi yang serba digital.
- 3) Konseling pra nikah. Melalui layanan ini maka para calon pengantin akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang konsep pernikahan yang ideal menurut agama, bagaimana menyiapkan mental sebelum menikah, membangun komunikasi dengan pasangan, membangun komitmen suami isteri serta menyiapkan skill yang harus dimiliki agar keluarga yang dibangun dapat memiliki kemampuan ekonomi yang mendukung terwujudnya keluarga sejahtera.
- 4) Konseling keluarga remaja dan remaja. Melalui layanan ini, keluarga yang memiliki remaja dan remajanya sendiri akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun komunikasi efektif antara

orangtua dengan remaja, bagaimana membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan remaja, bagaimana cara mengatasi persoalan yang membelit remaja, bagaimana menghindari persoalan yang berkaitan dengan seksualitas, narkoba maupun HIV-AIDS, dan sebagainya.

- 5) **Konseling keluarga lansia dan lansia.** Melalui layanan ini keluarga yang memiliki lansia dan para lansianya akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik lansia, menjaga kesehatan reproduksinya, menyiapkan mental psikologis dan spiritual, tetap menjaga hubungan sosial kemasyarakatan dan menyiapkan kegiatan ekonomi produktif yang masih memungkinkan dilakukan oleh lansia.
- 6) **Konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.** Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang penggunaan alat/cara kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kanker alat reproduksi hingga menjaga kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak.
- 7) **Konseling keluarga (married conceling).** Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses yang seluas-luasnya untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun keluarga harmonis, menjalankan fungsi-fungsi keluarga serta bagaimana melakukan berbagai penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga serta mengatasi berbagai permasalahan dalam keluarga.
- 8) **Pembinaan usaha ekonomi keluarga.** Melalui layanan ini keluarga akan mendapatkan banyak informasi tentang

bagaimana membangun wirausaha, mengelola dan mengembangkannya serta mendapatkan bantuan teknis produksi, akses modal, pemasaran dan sebagainya. Melalui berbagai layanan tersebut, maka dapat dipastikan keluarga akan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga sebagai modal dasar untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Kelompok kader lain yang berada di lapangan dan terjun langsung di masyarakat adalah Kader Tribina Keluarga, yang terdiri dari:

1) Bina Keluarga Balita

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

2) Bina Keluarga Remaja

Bina keluarga remaja (BKR) adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas.

### 3) Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia adalah Kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok bina keluarga yang ada di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yaitu:

1. Kelompok Bina Keluarga Balita sebanyak 134 kelompok
2. Kelompok Bina keluarga Remaja sebanyak 131 kelompok
3. Kelompok Bina Keluarga Lansia sebanyak 133 kelompok

### **C. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri atas Program Keluarga Berencana, Program Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat, Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Program Pengendalian Penduduk. Program kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung yang memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara umum yang menjadi target binaan adalah Pasangan Usia Subur (PUS) serta peserta Keluarga Berencana yang ada di Kota Bandar Lampung. Data Perkembangan Peserta KB dan Pasangan Usia Subur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Capaian PUS,PA dan PB

Tahun	PUS	PA	PB
2020	173.004	125.938	18.600
2021	126.596	66.323	26.268
2022	120.223	65.888	24.296
2023	129.230	81.695	7.727
2024	128.729	93.330	5.489

Sumber : LAPORAN SIGA

Keterangan :

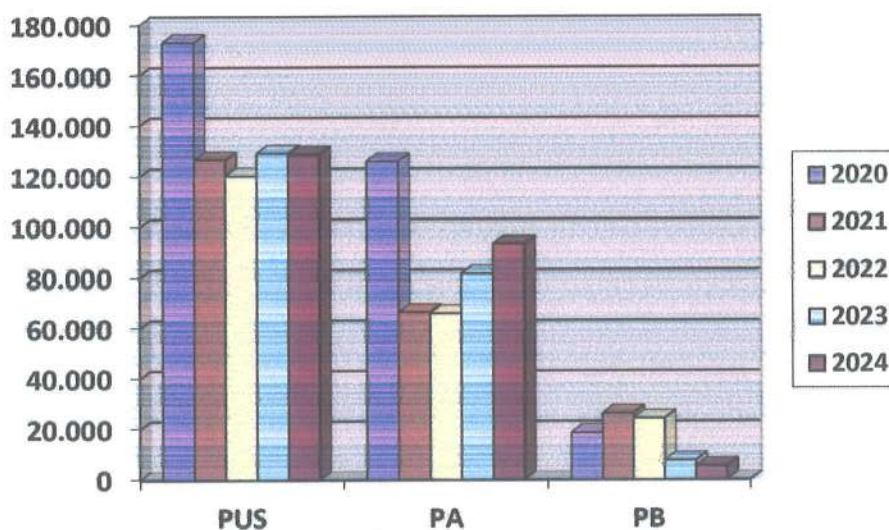
PUS : Pasangan Usia Subur

PA : peserta KB aktif (peserta KB secara terus menerus tanpa disertai kehamilan)

PB : peserta KB baru

Grafik 2.1

Perkembangan Peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024



Perkembangan Peserta KB baru dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas. Semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur maka jumlah peserta KB aktif juga terlihat semakin meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya KB semakin meningkat.

## **2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek positif yang berakibat pada munculnya potensi-potensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang baru, tetapi bisa pula berupa pertumbuhan negatif yang membawa konsekuensi bertambahnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek negative dari pertumbuhan penduduk yang tidak dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang tinggi serta permasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan dan permasalahan sosial lainnya yang akan bertambah saat jumlah penduduk telah malampaui kapasitas ruang untuk menampungnya

Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung pada periode 2021-2024 adalah sebesar 1,77 %, Walaupun demikian, upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetap harus dilakukan. Apalagi, terdeteksi bahwa mulai tahun 2010, Indonesia telah masuk dalam fenomena yang terjadi seabad sekali yang disebut Bonus Demografi.

Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk

menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan Fertilitas banyak dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat sasaran serta memperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang dikoordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Penduduk memang sama halnya dengan kemiskinan, tak dapat dihadang, tak dapat dikurangi. Yang bisa dilakukan dari sekarang dan untuk seterusnya, khususnya dalam masalah pertumbuhan penduduk, adalah menekan dan meminimalisir pertumbuhannya. Sebab, jika Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung tidak memanfaatkan momentum ini, maka Bandar Lampung justru akan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama dalam hal ini dipromotori oleh Program Pengendalian Penduduk hendaknya memperhatikan kondisi kependudukan baik saat ini maupun pada waktunya Bonus Demografi telah mencapai puncak pengaruhnya terhadap stabilitas Indonesia di tahun 2045 nanti.

Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi juga dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga dikenal sebagai jendela kesempatan (*windows of oppprtunity*) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut. Banyak Negara menjadi kaya karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai; seperti yang terjadi di Cina, yang pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi berkisar pada angka 6% meningkat menjadi 9,2 persen, Korea Selatan dari 7,3 persen menjadi 13,2 persen, Singapura dari 8,2 persen meningkat menjadi 13,6 persen dan Thailand dari 6,6 persen meningkat tajam menjadi 15,5 persen

Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya paska bonus demografi yang harus diperhatikan yaitu terjadinya peningkatan pendudukusia tua sementara transisi usia muda menjadiusia produktif belum sempurna. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan social dan pensiunanan sehingga akan mendorong terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan keduaahal tersebut.

Jika diperhatikan lebih seksama, bonus demografi akan menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui

pemanfaatan SDM yang produktif dalam arti bahwa penduduk usia produktif tersebut benar-benar mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat dimobilisasi menjadi investasi. Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang jumlah besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam sebuah perekonomian, maka akan menjadi beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak memiliki pendapatan akan tetap menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya dalam hal ini adalah Program Pengendalian Penduduk antara lain adalah

1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB.
2. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga.
3. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.
4. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya *unmet need* dan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi
5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun.
6. Antisipasi Bonus Demografi pada periode 2026-2030 melalui program Bangga Kencana

Untuk mengatasi masalah atau kendala yang telah diuraikan di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung mencoba meningkatkan pelayanan dengan cara, antara lain :

1. Meningkatkan kegiatan Program Bangga Kencana seperti Pembinaan tenaga lini lapangan, Penyuluhan program Bangga Kencana, KIE dan konseling program Bangga Kencana, Pelayanan data dan informasi Bangga Kencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan maupun pemakaian alat kontrasepsi modern ( MKJP).
3. Mengusahakan pemerataan tempat dan tenaga pelayanan KB baik dari unsur pemerintah maupun swasta
4. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.

## **2.2 Permasalahan dan Isu strategi perangkat daerah.**

### **A. Permasalahan perangkat daerah**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain:
  - Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
  - Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi masih rendah
  - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan pembangunan keluarga
  - Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;

- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
- Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan
  - Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi
  - Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),
  - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun
  - Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
  - Rendahnya kesertaan KB Pria
  - Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan

- Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
  - Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
  - Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- e. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB.

## **B. Penentuan Isu-isu Strategis**

Perencanaan pembangunan seyogyanya berorientasi kependudukan, mengingat penduduk sebagai fokus dan dasar utamadalama berbagai aspek pembangunan. Kependudukan memegang peranan penting dalam pembangunan. Kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan indikator kependudukan, seperti jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk. Berbagai indikator kependudukan tersebut berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan budaya. Selanjutnya berbagai bidang tersebut juga berpengaruh balik terhadap

resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:

- Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi
- Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah
- Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja
  - Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
  - Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah;
  - Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

- Masih tingginya jumlah keluarga miskin,
- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;

fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Pada akhirnya fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk berperan dalam menentukan jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk.

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan Keluarga Berencana dapat dirumuskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- Jumlah penduduk yang terus bertambah
- Ledakan penduduk usia kerja muda
- Data kependudukan yang belum memadai
- Mobilitas penduduk meningkat

Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Bonus demografi	Urbanisasi dan Pertumbuhan Penduduk Tinggi. Pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai - 1.14 juta jiwa penduduk dengan 65% tinggal di perkotaan	Tingginya laju urbanisasi dengan sebagian besar populasi tinggal di perkotaan menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik.	Polarisasi sosial juga menjadi salah satu risiko global yang terjadi di beberapa negara di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan dan nilai yang sangat berbeda, sering kali menyebabkan ketegangan, konflik, dan perpecahan	Bonus demografi Indonesia, pada rentang tahun 2025-2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan puncak peningkatan usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun di tahun 2045. proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia kedepannya	Pengendalian pertumbuhan penduduk memerlukan perencanaan keluarga yang matang dan berkelanjutan, dengan fokus pada pendidikan, kesadaran masyarakat, layanan kesehatan reproduksi, dan kebijakan keluarga berencana	Bonus demografi juga menjadi salah satu tantangan pada pembangunan transformasi sosial dimana diproyeksikan di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) yang diproyeksikan pada tahun 2030

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut:

**Misi I: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat**

- a. Tujuan :** Terwujudnya keluarga yang berkualitas
- b. Sasaran :** Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk
- c. Indikator Sasaran :**
  - 1. Angka kelahiran total (TFR)
  - 2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( *age specific fertility rate / ASFR 15-19* )
  - 3. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ModernContraceptive Prevalence Rate (mCPR).
  - 4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).
  - 5. Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

Tabel 3.1 . Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**TABEL 3.3**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target Capaian						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>VISI: BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT</b>  <b>MISI: MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>	<b>Terwujudnya Keluarga yang berkualitas</b>	<b>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</b>	Total Fertility Rate ( TFR )	%	2,15	2,14	2,14	2,14	2,13	2,13	
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19 )	Angka	19	18	17	16	15	15	
			Angka prevalensi Kotnrasepsi Modern/Modern Contraceptive ( Mcpr)	%	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50	
			Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	%	8,70	8,65	8,60	8,55	8,50	8,25	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ( BKB ) yang Ber-KB	%	89	90	92	94	95	95	

**Tabel 3.4 PENAHPAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Terkendalinya penambahan jumlah penduduk

**Tabel 3.5 ARAH DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	MISI: MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk	Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk	
2		Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB	
3		Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja	Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada pada Tabel 4.2,4.3, 4.4, 4.5,4.6

Tabel 4.2  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, Kegiatan dan sub kegiatan
PERATURAN KEPALA BKKBN NOMO 8 TAHUN 2024	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas						
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia					
			Laju pertumbuhan penduduk				
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			
					Total Fertility Rate ( TFR )		
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Spesific Fertilty Rate / ASFR 15-19 )		
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya
						Pemetaan program pembangunan keluarga,kependudukan,dan keluarga berencana ( Bangsa Kencana )	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ( Bangsa Kencana)
						Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
PERATURAN KEPALA BKKBN NOMO 8 TAHUN 2024	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas						
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia					
			Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana ( KB )				

				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana ( KB )			
					Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive ( mCPR )		
					Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)		
						<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	

PERATURAN KEPALA BKKBN NOMO 6 TAHUN 2024	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas						
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia					
			Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)				
				Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)			
					Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga		
						<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah Isiporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
					Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UJPPKA)		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UJPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga		Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
					Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Tabel 4.3  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN RENSTRA  
TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator /Out come/Out Put	Satuan	Base line (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana	Persen	98,00	98,00	5.271.115.739	98,00	5.429.141.076	98,00	5.715.056.639	98,00	5.913.701.989	98,00	5.985.897.928	98,00	6.148.096.394	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	98,00	98,00	16.304.967	98,00	16.304.967	98,00	25.304.967	98,00	26.570.215	98,00	27.898.726	98,00	24.443.467	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	16.304.967	4	16.304.967	4	25.304.967	4	26.570.215	4	27.898.726	4	24.443.467	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100,00	100,00	4.107.048.195	100,00	4.116.585.163	100,00	4.315.608.554	100,00	4.593.898.152	100,00	4.667.522.354	100,00	4.893.178.389	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	29	3.952.634.344	29	3.962.179.312,00	29	4.161.202.703	29	4.439.292.301	29	4.513.116.703	29	4.738.772.538	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	147.196.520	1	147.196.520	1	147.196.520	1	147.196.520	1	147.196.520	1	147.196.520	
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	7.209.331	1	7.209.331	1	7.209.331	1	7.209.331	1	7.209.331	1	7.209.331	
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		80,00	15.000.000	80,00	15.000.000	80,00	15.000.000	80,00	15.000.000	80,00	15.000.000	80,00	15.000.000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	29	15.000.000	29	15.000.000,00	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98,00	98,00	281.081.577	98,00	162.561.446	98,00	202.238.518	98,00	191.528.722	98,00	188.573.848	98,00	138.573.648	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.058.807	1	4.878.514	1	5.122.440	1	5.378.562	1	5.378.562	1	5.378.562	



Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator /Out come/Out Put	Satuan	Base line (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	149.680.000	6	149.680.000	6	157.164.000	6	157.164.000	6	157.164.000	6	157.164.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	14.580.000	5	14.580.000	5	15.309.000	5	15.309.000	5	15.309.000	5	15.309.000	
Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	1	212.000.000	1	212.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate ( TFR )	persen	2,15	2,15	28.872.832	2,14	41.232.476	2,14	38.358.709	2,14	40.361.893	2,13	41.488.142	2,13	44.787.029	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19 )	Angka	19	19	89.559.767	18	51.550.767	17	51.550.767	16	51.550.767	15	51.550.767	15	51.550.767	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	89.423.599	100	77.423.599	100	77.423.599	100	91.912.660	100	93.038.909	100	77.423.599	
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	1	1	25.636.042	1	25.636.042	1	25.636.042	1	25.636.042	1	25.636.042	1	25.636.042	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	29.914.725	1	25.914.725	1	25.914.725	1	25.914.725	1	25.914.725	1	25.914.725	
Pemetaan program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana ( Bangsa Kencana )	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	1	29.872.832	1	25.872.832	1	25.872.832	1	25.872.832	1	25.872.832	1	25.872.832	
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan	1	0	-	1	15.359.644	1	12.485.877	1	14.489.061	1	15.615.310	1	18.914.197	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive ( mCPR ) %	%	72,24	73,50	7.650.344.736	74,50	7.913.462.286	75,50	7.039.863.698	76,50	7.238.558.485	77,50	7.347.991.624	77,50	7.689.415.808	
	Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi ( unmet need )	%	8,70	8,70	2.228.720.742	8,65	2.336.759.472	8,60	2.265.470.712	8,55	2.274.098.796	8,50	2.281.228.968	8,25	2.281.228.968	

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator /Out come/Out Put	Satuan	Basis Ilm (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	141.790.883	2 Kegiatan	141.790.883	2 Kegiatan	141.790.883	2 Kegiatan	148.880.427	2 Kegiatan	148.880.427	2 Kegiatan	723.133.563	
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	12	12	37.106.088	12	37.106.088	12	37.106.088	12	38.961.392	12	38.961.392	60	38.961.392	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	104.684.795	1	104.684.795	1	104.684.795	1	109.919.035	1	109.919.035	5	109.919.035	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7.508.553.855	2 Kegiatan	7.771.671.383	2 Kegiatan	6.898.072.815	2 Kegiatan	7.089.678.038	2 Kegiatan	7.199.111.197	2 Kegiatan	6.966.282.068	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	1	1	71.000.000	1	71.000.000	1	74.550.000	1	74.550.000	1	74.550.000	1	87.277.500	
Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	2900	2900	7.437.553.855	2900	7.700.671.383	2900	6.823.522.815	2900	7.015.128.038	2900	7.124.561.197	2900	6.879.004.505	
Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	1.107.829.912	12	1.160.888.872	12	1.107.829.912	12	1.114.626.496	12	1.121.750.608	60	1.121.750.608	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	1	1	135.811.672	1	135.811.672	1	135.811.672	1	142.602.256	1	149.732.368	5	149.732.368	
Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	888.498.240	12	961.537.200	12	888.498.240	12	888.498.240	12	888.498.240	60	888.498.240	
Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	12	12	83.520.000	12	83.520.000	12	83.520.000	12	83.520.000	12	83.520.000	60	83.520.000	



Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator /Out come/Out Put	Satuan	Base line (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	134	134	4.559.188.219	134	4.517.662.670,00	134	4.604.976.859	134	4.835.225.702	134	4.723.519.672	134	5.059.616.593	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.244.190	2 Kegiatan	105.244.192,00	2 Kegiatan	110.506.402	2 Kegiatan	116.031.721,88	2 Kegiatan	121.833.307,76	2 Kegiatan	121.833.308	
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	kelompok	1	1	18.134.471	1	18.134.471	1	19.041.195	1	19.993.254	1	20.992.917	1	20.992.917	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerjam Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1	57.109.719	1	87.109.721	1	91.485.207	1	96.038.487	1	100.840.391	1	100.840.391	

**Tabel 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	<p>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan</p> <p>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</p> <p>Pemetaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ( Bangsa Kencana )</p> <p>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</p>	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana ( KB )	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pengendalian Program KKBPK</p> <p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</p> <p>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p> <p>Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Sarana Pemunjang Pelayanan KB</p> <p>Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p> <p>Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak</p> <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas</p> <p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera ( KS )	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
			Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	

**Tabel 4,5 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate ( TFR )	PERSEN	2,15	2,14	2,14	2,14	2,13	2,13
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19 )	ANGKA	19	18	17	16	15	15
3	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive ( mCPR )	PERSEN	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50
4	Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	PERSEN	8,70	8,65	8,60	8,55	8,50	8,25
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ( BKB ) yang Ber-KB	PERSEN	89	90	92	94	95	95

**Tabel 4,6 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate ( TFR )	PERSEN	2,15	2,14	2,14	2,14	2,13	2,13
2	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive ( mCPR )	PERSEN	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50
3	Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	PERSEN	8,70	8,65	8,60	8,55	8,50	8,25

**POHON KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025 -2029**

**VISI**  
BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAJING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

**MISI**  
MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

**SASARAN**  
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN
OUTCOME
OUTPUT
INDIKATOR

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**  
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana  
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung  
Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung  
Penilaian Kinerja

**Penyusunan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkeadilan  
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD  
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja (SKPD)

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Penyusunan dan Pembinaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang Akuntabel  
Penyediaan Salid dan Tanggapan ASB  
Jumlah Pembinaan GAB dan Tanggapan ASB  
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengipis/Purifikasi Usungan SKPD  
Administrasi Keuangan yang Tertib  
Koordinasi dan pengawasan sistem keuangan akhir tahun SKPD  
Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun

**Administrasi Urusan Perangkat Daerah**  
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dalam Organisasi SKPD  
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran  
Pengadaan barang dan jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah atau lembaga lainnya  
Jumlah Penganggaran Perangkat Daerah  
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pembinaan Jasa Penunjang Pelaksanaan SKPD  
Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Inventarisasi Barang yang Tertib

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
SASARAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
OUTCOME	Laju pertumbuhan penduduk
OUTPUT	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk
INDIKATOR	Total Fertility Rate ( TFR ) Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19 ) Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah ketubuhan Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemasaran Pelayanan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Inspektori/Kota Jumlah Ketubuhan Pemasaran Pelayanan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Inspektori/Kota

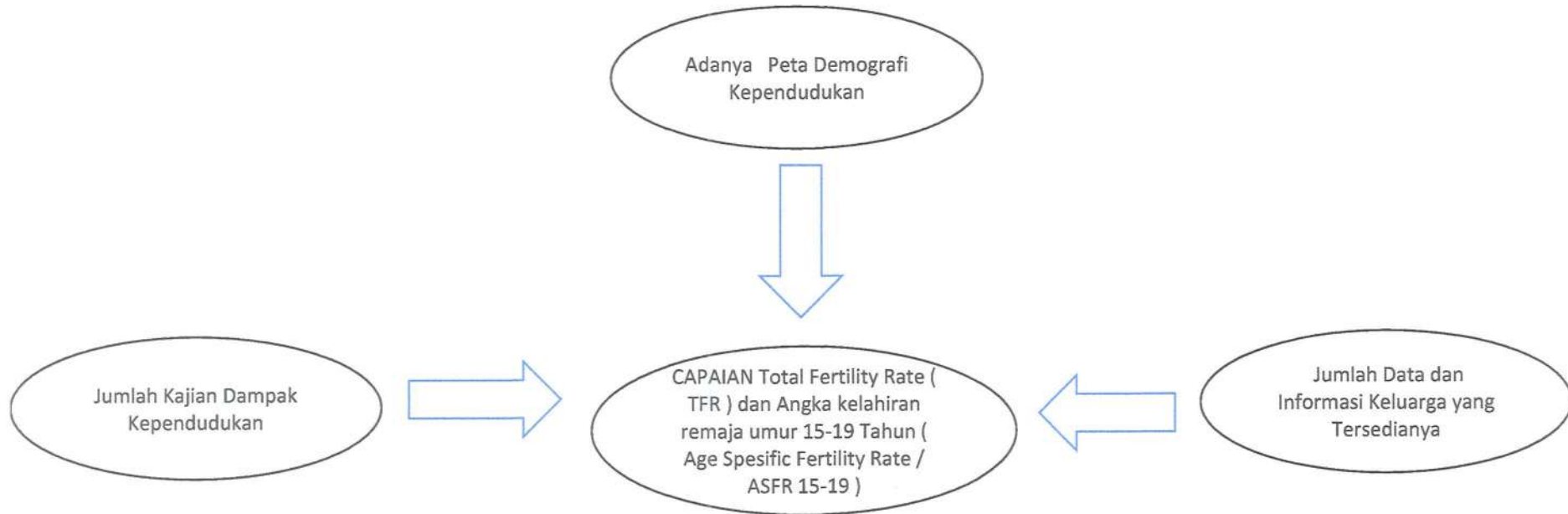
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
SASARAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
OUTCOME	Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana ( KB )
OUTPUT	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana ( KB )
INDIKATOR	Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive ( mCPR ) Pelaksanaan Administrasi, Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (SIE) Pengendalian Penduduk dan SD Sosial Sanitasi Budaya Lokal Jumlah ketubuhan Pelaksanaan Administrasi, Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (SIE) Pengendalian Penduduk dan SD Sosial Sanitasi Budaya Lokal Regulasi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Peraga Lapangan (PK/PJ/PR) Jumlah ketubuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Peraga Lapangan KB (PK/PJ/PR) Regulasi Pengendalian dan pemberdayaan ASB dan Olat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota Jumlah ketubuhan Pengendalian dan pemberdayaan ketubuhan ASB dan Olat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Peringatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Inspektori/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber KB Jumlah ketubuhan Pemberdayaan dan Peringatan Peran Serta Organisasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
SASARAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
OUTCOME	Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera ( KS )
OUTPUT	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera ( KS )
INDIKATOR	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga Pelaksanaan Pendayagunaan Keluarga melalui Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Jumlah ketubuhan Pelaksanaan Pendayagunaan Keluarga melalui Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Pelaksanaan dan Peringatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Inspektori/ Kota dalam Pendayagunaan Keluarga melalui Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Jumlah ketubuhan Pelaksanaan dan Peringatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Inspektori/ Kota dalam Pendayagunaan Keluarga melalui Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga

## CROSS CUTTING PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Total Fertility Rate ( TFR )

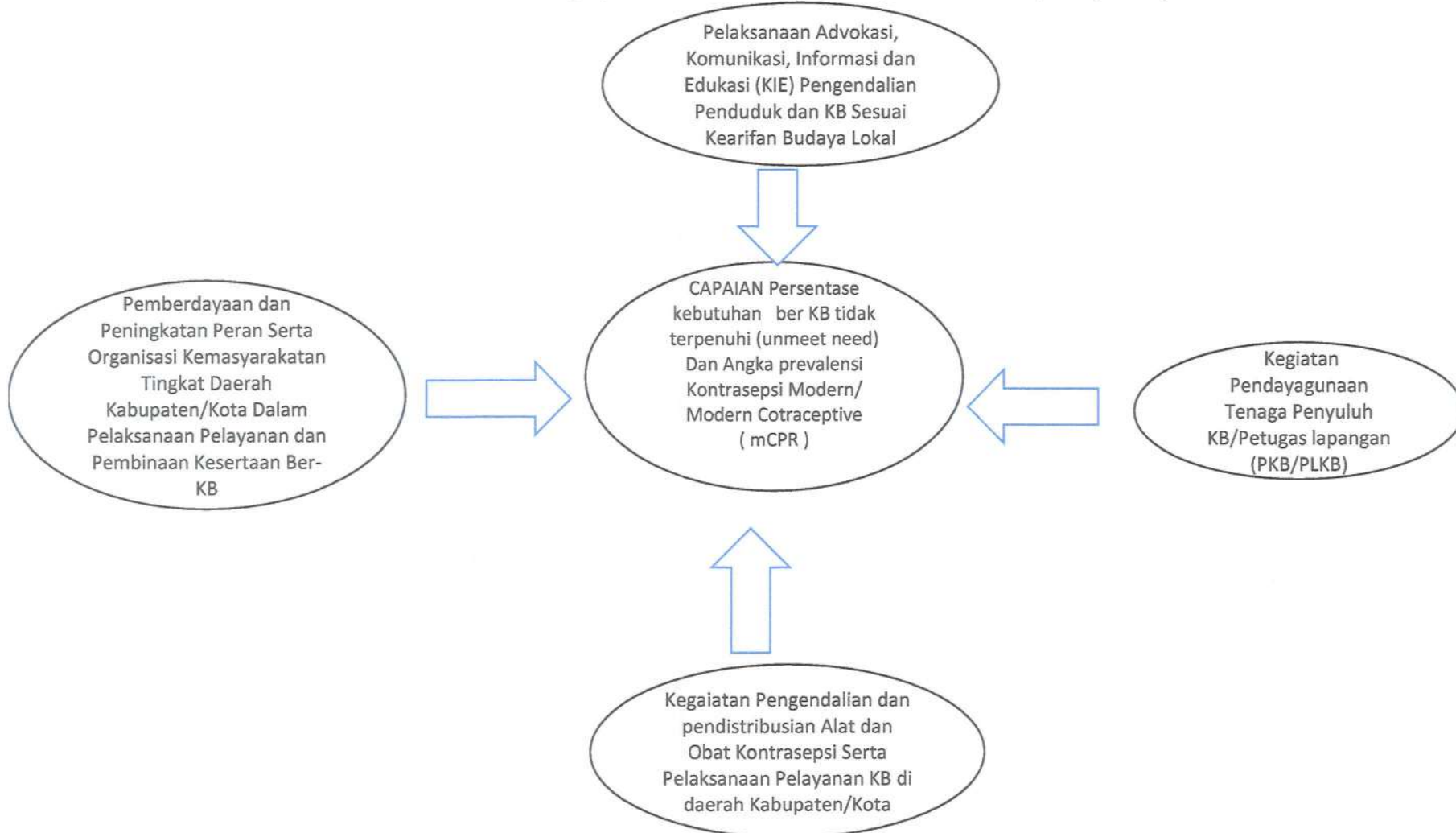
Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19 )



## CROSS CUTTING PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

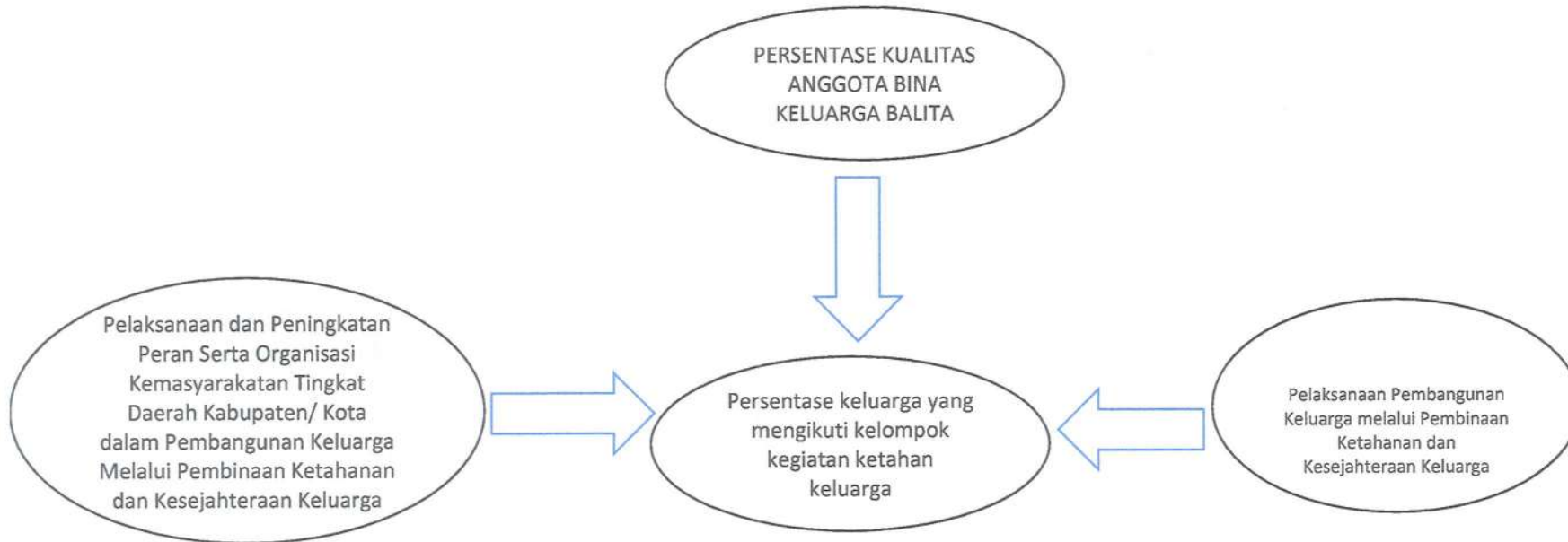
Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)

Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive ( mCPR )



## CROSS CUTTING PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

IKU CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA ( BKB ) Yang Ber KB



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2025-2029 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bandar Lampung. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,**



**EVA DWIANA**